

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan manajemen bencana banjir Rob yang berlangsung di kawasan permukiman Rumah Deret Tambakrejo, dilakukan dengan pendekatan sistem tanggap bencana menggunakan empat tahapan di dalamnya. Tahapan yang paling awal dilakukan yakni *Mitigation, Preparedness, Response dan Recovery* empat tahapan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh komponen yang dilakukan memiliki peran masing-masing untuk dapat membantu masyarakat dalam membentuk ketahanan terhadap ancaman banjir Rob yang terus terjadi di permukiman Rumah Deret. Mitigasi bencana banjir Rob yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan Rumah Reret lebih berfokus ke dalam upaya struktural seperti pembangunan tanggul. Namun, kegiatan non-struktural seperti edukasi kepada masyarakat masih dilakukan oleh LSM, mahasiswa dan kelompok pecinta alam. Belum hadirnya pemerintah dalam melakukan mitigasi non-struktural bisa menjadikan kendala untuk membentuk kesadaran masyarakat, padahal kombinasi dari kedua komponen ini sangat penting dalam menciptakan mitigasi bencana yang efektif serta berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap manajemen bencana banjir Rob di kawasan Rumah Deret Tambakrejo, dapat disimpulkan bahwasanya penganan

yang dilakukan masih belum optimal dan masih terbatas pada inisiatif masyarakat serta organisasi non-pemerintah. Mitigasi yang dilakukan masyarakat saat ini masih terbatas pada mitigasi struktural sederhana dan masih terbatas pada adaptasi mandiri warga, masyarakat Rumah Deret belum pernah mendapatkan edukasi dan sosialisasi terkait dengan kebencanaan. Pada, fenomena banjir Rob di kawasan Rumah deret terjadi di setiap harinya berkita 20 cm sampai dengan 50 cm. Masih sangat minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan di Rumah Deret mengakibatkan masyarakat yang tinggal di dalamnya menghadapi bencana banjir Rob tanpa adanya fasilitas evakuasi dan sistem tanggap darurat yang baik. Dari fenomena ini menunjukkan bahwasanya terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan prakteknya di lapangan, jelas dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan bahwasanya harus diberikan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat terdampak.

Dari sudut pandang kebijakan, pembangunan Rumah Deret telah menarik banyak pihak untuk berpartisipasi melalui model tata Collaborative Governance. Namun, dalam pelaksanaanya masih menghadapi tantangan teknis, seperti penyelesaian tanah yang tidak merata dan penggunaan geotextile yang belum maksimal. Selain itu, BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana juga tidak melakukan intervensi khusus dalam penyelamatan banjir rob di Rumah Deret karena bencana banjir Rob yang terus terjadi dianggap sebagai fenomena rutin dan bukan darurat.

Sedangkan proyek pembangunan tembok laut Tambak Lorok yang digagas Kementerian PUPR dan BBWS Pemali Juana merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Pembangunan tanggul sepanjang 3,6 km ini masuk dalam tahap prabencana sebagai bentuk mitigasi struktural untuk mengurangi risiko banjir rob dan diharapkan dapat melindungi kawasan Tambak Lorok hingga 30 tahun ke depan.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan strategi pengurangan risiko bencana dengan memperkuat peran pemerintah di bidang edukasi, penyediaan fasilitas bantuan bencana, dan sinergi dengan masyarakat lokal untuk menciptakan kesiapsiagaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran bencana harus diperkuat agar proyek pengurangan bencana seperti pembangunan tembok laut benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan dalam proses manajemen bencana banjir Rob di kawasan Rumah Deret Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Dari keempat tahapan sistem tanggap bencana seperti Mitigation, Preparedness, Response dan Recovery belum diterapkan di permukiman Rumah Deret.

1. Jalinan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa dipandang bukan hanya sebagai suatu langkah mitigasi yang holistik. Namun, juga bisa dijadikan cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama. Perspektif ini akan mengadakan kerjasama dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra bukan sebagai objek penerimaan bantuan. Dengan menggandeng kerjasama bersama LSM dan komunitas mahasiswa diharapkan bisa menjadi jembatan penyalur informasi serta akses terhadap sumber daya di tengah-tengah masyarakat, dengan ini aspirasi yang ada di masyarakat bisa tersalurkan kepada pemangku kepentingan.

2. Melakukan mitigasi Non-struktural yang berkelanjutan

Hendaknya mitigasi Non-struktural dengan mencakup sosialisasi dan pelatihan kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, bisa menjadi prioritas dalam melakukan pendekatan yang sistematis. Pemerintah Kota Semarang bisa mengambil langkah dengan membuat program-program edukasi dengan melibatkan komunitas, sekolah atau bahkan kelompok-kelompok masyarakat, tentunya dengan dilakukannya pelatihan diharapkan masyarakat yang tinggal di lokasi rentan akan bencana banjir Rob bisa mengetahui risiko banjir Rob, serta masyarakat akan diberi pemahaman tentang cara menghadapi bencana banjir Rob dengan tepat seperti tidak meletakkan barang elektronik di tempat yang rendah untuk

menghindari konsleting listrik akibat genangan air, melakukan penanaman tanaman laut seperti mangrove dengan membuat Sabuk Hijau pantai dan padang laut untuk menghindari abrasi, melakukan pelatihan kebencanaan seperti membuat jalur evakuasi dan menerapkan sistem peringatan dini yang terstruktur. Hal ini penting untuk dilakukan dalam memastikan bahwasanya setiap masyarakat memiliki kapasitas, kesiapan dan kesadaran dalam merespon situasi bencana.

3. Mengaktifkan kembali peranan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dan Kelurahan Siaga Bencana (KSB)

Hendaknya kedua organisasi ini lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanggulangan bencana di tingkat yang paling rendah. Dengan aktifnya kembali KTB dan KSB memungkinkan koordinasi yang lebih efektif di antara masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga kebutuhan yang ada di lapangan bisa merespon secara cepat dan tepat. Namun, cukup disayangkan bahwasanya KTB dan KSB yang ada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk mengaktifkan fungsi dari KTB dan KSB, dengan aktifnya organisasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana.